

# IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH (JPD) DI SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA

## IMPLEMENTATION OF REGIONAL EDUCATION GUARANTEE PROGRAM AT STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 1 YOGYAKARTA

Oleh: Alifia Ayu Ramadhani, Universitas Negeri Yogyakarta  
[alifiaayu.2019@student.uny.ac.id](mailto:alifiaayu.2019@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah di SMP Negeri 1 Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah kepala UPT-P JPD, guru pengelola JPD, orang tua, dan siswa. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program JPD di SMPN 1 Yogyakarta telah diimplementasikan berdasarkan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Adapun factor pendukung implementasi program tersebut yakni orang tua yang kooperatif, sedangkan faktor penghambatnya yaitu masyarakat yang masih belum mengetahui kegunaan KMS untuk mendapatkan jaminan pendidikan daerah.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Jaminan Pendidikan Daerah

### Abstract

*This study aims to describe the implementation of the regional education guarantee program (JPD) at SMP Negeri 1 Yogyakarta and its supporting and inhibiting factors. This research is a descriptive qualitative research. The research subjects were the head of UPT-P JPD, JPD management teachers, parents and students. The research was conducted at SMP Negeri 1 Yogyakarta. Data collection used observation, interview, and documentation techniques. Data were analyzed using an interactive model with data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages. The results showed that the JPD program at SMPN 1 Yogyakarta had been implemented based on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The supporting factors are cooperative parents, while the inhibiting factor is that the benefits of KMS to access JPD are not yet known to the entire community.*

*Keywords: Program Implementation, Regional Education Guarantee Program*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencerdaskan dan menjadikan manusia sebagai makhluk individu yang cerdas, unggul, berakhlak mulia, dan dapat berpikir kritis. Pendidikan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pendidikan juga hak yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 (1) dimana “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan tersebut harus adil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam

UUD 1945 pasal 28 C (1) “dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia sesuai dengan undang undang nomor 20 tahun 2003 yang membahas pendidikan merupakan usaha terencana dan sadar agar proses belajar dan kondisi belajar dapat terwujud dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong siswa agar dapat membentuk dan menggali potensi supaya memiliki kecerdasan, kepribadian, akhlak serta keterampilan dalam bidang kehidupan.

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu membangun kualitas bangsa ke aspek-aspek kehidupan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah mengupayakan program pendidikan dapat diakses oleh masyarakat secara merata tanpa terkecuali, sehingga tidak adanya anak putus sekolah atau tidak sekolah. Langkah pemerintah dalam menangani pemerataan pendidikan adalah program wajib belajar 12 tahun. Oleh dari itu pemerintah melalui Permendikbud No. 10 Tahun 2020 memberikan akses kepada masyarakat dimana untuk anak usia enam tahun sampai dua puluh satu tahun.

Pada pelaksanaan pendidikan wajib 12 tahun juga harus didasarkan pada pendanaan pendidikan. Kebutuhan ekonomi menjadi

salah satu aspek yang mendukung kelanjutan pendidikan dalam keluarga, banyak anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan disebabkan oleh permasalahan ekonomi keluarga, tingginya biaya pendidikan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Realita yang selalu muncul di Indonesia yaitu permasalahan anak putus sekolah. Putus sekolah bukanlah persoalan baru dalam dunia pendidikan, permasalahan tersebut tidak bisa dipisahkan pada aspek ekonomi keluarga. Hal ini dibuktikan dengan jumlah angka putus sekolah di tahun ajaran 2022/2023 dari data Statistik Kemdikbud sebanyak 40.623 siswa jenjang SD, 13.176 siswa jenjang SMP, 10.091 siswa jenjang SMA, serta 12.234 siswa jenjang SMK, apabila dijumlah seluruhnya terdapat 76.124 anak putus sekolah di tingkat nasional (Data Statistik Kemdikbud, 2023).

Kemudian dilihat dari angka putus sekolah di Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Yogyakarta. Data Kemdikbud di Kota Yogyakarta dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan tahun ajaran 2022/2023 ditemukan angka putus sekolah sebanyak 105 siswa SD, 31 siswa SMP, 14 siswa SMA, dan 88 siswa SMK, keseluruhan anak putus sekolah 238 siswa (Data Statistik Kemdikbud,

2023). Dilihat dari data tersebut angka putus sekolah terbanyak sampai sedikit adalah jenjang SD, SMK, SMP, dan yang terakhir SMA. Peneliti akan berfokus pada jenjang sekolah menengah pertama.

Melalui angka putus sekolah dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah diantaranya adalah tingginya biaya pendidikan, rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses infrastruktur pendidikan (Luluk, 2020:53).

Sejalan dengan Burhanudin (2022) bahwa penyebab putus sekolah adalah lingkungan keluarga dikarenakan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama anak yang kemudian berlangsung secara informal dan wajar. Mengingat ada banyak keadaan keluarga mulai dari keluarga kaya atau miskin (Sabarudin et al, 2018:246). Penjelasan beberapa peneliti tersebut bisa dikatakan bahwa salah satu pengaruh terbesar pada putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk kategori miskin di Kota Yogyakarta tahun 2022 sebesar 6,62% atau sekitar 29.680 jiwa penduduk miskin (<https://bappeda.jogjakota.go.id>, 2023). Dilihat dari data tersebut menjelaskan masih banyaknya keluarga miskin di Kota Yogyakarta. Langkah pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan akses kepada

masyarakat salah satunya adalah pemberian program jaminan pendidikan daerah. Program tersebut diberikan kepada siswa yang terdaftar di Kartu Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) pemegang KMS maupun peserta didik yang telah diajukan oleh sekolah.

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan untuk memenuhi Permendikbud No. 10 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta adalah pemberian bantuan program jaminan pendidikan daerah.

Jaminan pendidikan daerah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dari SD sampai SMA/ sederajat, supaya anak putus sekolah atau tidak sekolah bisa melanjutkan sekolah formal maupun non formal. Melalui pemberian bantuan program JPD diharapkan akan ada banyak siswa yang dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai (Peraturan Walikota Yogyakarta No. 18 Tahun 2021).

Di Kota Yogyakarta telah melaksanakan desentralisasi pendidikan yang diberlakukan dalam bentuk Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Bantuan tersebut berupa biaya personal yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan anak (Luluk, 2020: 52).

Kepala UPT JPD Dinas Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sekitar 13.000 siswa tidak mampu di Kota Yogyakarta telah menerima jpd untuk penyaluran sepanjang semester pertama (<https://m.harianjogja.com> , 2023). Bahkan dengan adanya bantuan sebanyak 13.000 masih terdapat kesenjangan berupa anak putus sekolah dilihat dari data kemdikbud.

Berdasarkan kondisi anak putus sekolah beserta data kemiskinan di Kota Yogyakarta yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk melihat secara menyeluruh mengenai program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 1 Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP N 1 Yogyakarta, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program jaminan pendidikan daerah.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 8 Mei-3 Agustus 2023.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala UPT-P JPD, guru pengelola JPD sekolah, orang tua siswa, serta siswa penerima bantuan JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi program jaminan pendidikan daerah di SMP Negeri 1 Yogyakarta.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi melalui website serta terjun langsung ke lapangan. Wawancara kepada kepala UPT-P JPD, guru pengelola JPD sekolah, orang tua siswa, serta siswa penerima bantuan JPD. Dokumen adalah foto, juknis pelaksanaan JPD, data siswa penerima, dan lain-lain.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian implementasi jaminan pendidikan daerah ini adalah analisis menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yaitu analisis penelitian kualitatif menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber bertujuan untuk

membandingkan hasil wawancara, sedangkan triangulasi teknik untuk membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di SMP Negeri 1 Yogyakarta**

Hasil penelitian implementasi program JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta, berdasarkan hasil analisis dapat ditunjukkan melalui hasil data sebagai berikut:

Aspek pertama yaitu komunikasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penyampaian informasi mengenai implementasi program JPD telah disosialisasikan dari dinas pendidikan Kota Yogyakarta yaitu pengelola JPD di UPT-P JPD kepada pengelola JPD di tingkat sekolah. Informasi mengenai program JPD telah disampaikan kepada siswa dan orang tua siswa tidak dalam sosialisasi akan tetapi dalam bentuk penginformasian program dan pengarahan dari sekolah. Pengelola JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta telah memberikan informasi dan pengarahan dengan baik tentang program JPD.

Aspek kedua, yaitu sumber daya. SMP Negeri 1 Yogyakarta memiliki 1 staf pengelola JPD yaitu guru BK yang menangani pelaksanaan program JPD. Staf pengelola JPD tersebut memiliki tugas dalam pemberian informasi kepada siswa dan orang tua, serta

mendata dan merekap siswa calon penerima JPD.

Kewenangan pihak pengelola JPD adalah mencatat dan merekap siswa yang memiliki KMS yang nantinya akan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pengelola JPD dinas sendiri memiliki wewenang berupa pemberian sosialisasi kepada pengelola JPD tingkat sekolah, membantu guru untuk merekap data siswa di SIM JPD yang telah disiapkan oleh dinas pendidikan.

Fasilitas untuk pelaksanaan program JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta adalah pemberian informasi serta pengarahan program, yang kemudian pengelola mencatat dan merekap siswa penerima JPD. Sedangkan dinas menyediakan SIM JPD yaitu fasilitas web yang bisa diakses oleh pengelola JPD sekolah maupun dinas, digunakan untuk memasukkan data siswa calon penerima JPD serta memverifikasi kembali data tersebut. Anggaran program JPD berasal dari APBD yang merupakan rencana anggaran yang berasal dari pemerintah Kota Yogyakarta.

Aspek ketiga, yaitu disposisi. Secara keseluruhan, kinerja pengelola program JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta dipandang sudah baik oleh siswa dan orang tua siswa dalam memberikan informasi dan arahan

terkait program JPD. Respon yang positif terhadap program JPD tidak hanya berasal dari pengelola saja, tetapi juga dari siswa yang merupakan kelompok sasaran program tersebut. Selain para siswa, orang tua juga sangat mendukung program JPD karena meringankan beban sekolah dengan membeli peralatan sekolah berupa seragam, sepatu, dan lain sebagainya.

Aspek keempat adalah struktur birokrasi. Baik sekolah maupun pengelola UPT-P JPD menggunakan SOP yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan Kota Yogyakarta. Tugas pengelola JPD adalah memberikan informasi terkait program, kemudian mencatat dan merekap data siswa yang nantinya akan dikirimkan ke dinas pendidikan Kota Yogyakarta

Adanya kerjasama dengan pihak pengelola di dinas pendidikan Kota Yogyakarta dalam sosialisasi terkait program JPD. Selain dengan dinas pendidikan, pengelola JPD di SMP Negeri 1 Yogyakarta juga menjalin koordinasi dengan orang tua siswa dalam pemberian informasi dan arahan mengenai pelaksanaan program JPD.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi JPD di SMPN 1 Yogyakarta**

Pelaksanaan implementasi program JPD terdapat faktor pendukung dan penghambat. Hal yang mendukung dari program tersebut adalah orang tua yang kooperatif, yaitu orang tua yang jika mengetahui tentang program

tersebut orang tua segera mengajukan siswa untuk didata oleh pengelola. Sedangkan penghambat program tersebut adalah sosialisasi tentang program JPD telah dilaksanakan, tetapi masih banyak masyarakat yang mendapat KMS dan masih belum memahami adanya kegunaan dari kartu tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan implementasi program JPD di SMPN 1 Yogyakarta berupa:
  - a) Komunikasi berupa penyampaian informasi tentang program telah disampaikan dari dinas ke sekolah, kemudian SMP Negeri 1 Yogyakarta juga telah menyampaikan program JPD ke siswa dan orang tua siswa;
  - b) Sumber daya yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta memiliki 1 guru pengelola, sumber daya dana berasal dari APBD, serta fasilitas berupa web SIM JPD;
  - c) Disposisi adalah adanya dukungan sumberdaya staf dan fasilitas yang baik, serta kinerja yang baik pula;
  - d) Struktur birokrasi adalah adanya petunjuk pelaksanaan dan kerja sama yang baik antara pengelola sekolah maupun pengelola dinas.

2. Faktor pendukung adalah orang tua yang kooperatif, serta faktor penghambat yaitu masyarakat yang masih belum mengetahui kegunaan KMS untuk mendapatkan jaminan pendidikan daerah.

### Saran

Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan, maka dari hasil penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan

Agar dinas pendidikan memperluas jaringan sosialisasi mengenai program JPD kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat yang menerima Kartu Menuju Sehat dapat mengakses informasi terkait layanan yang dapat diberikan oleh kartu tersebut bantuan pendidikan berupa jaminan pendidikan daerah.

2. Bagi Sekolah

Sekolah perlu melakukan sosialisasi program jaminan pendidikan daerah secara mendalam kepada siswa dan orang tua, sehingga siswa dan orang tua siswa dapat memahami program jaminan pendidikan daerah lebih baik lagi. Sekolah juga perlu meningkatkan intensitas informasi dan pengarahannya program JPD kepada siswa maupun orang tua pemahaman mengenai program jaminan pendidikan daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

Bappeda.Jogjakota. (2023). *Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan: Arah Kebijakan dan Mekanisme*

*Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2023.*  
<https://bappeda.jogjakota.go.id/detail/index/26516> Pada tanggal 30 Agustus 2023.

Harian Jogja. (2020). *Siswa Miskin di Jogja dapat Jaminan Pendidikan Daerah.*

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2022/07/20/514/1106718/13000-siswa-miskin-di-jogja-dapat-jaminan-pendidikan-daerah>  
Pada tanggal 2 Januari 2023

Kemdikbud. *Data Anak Putus Sekolah.*  
<https://statistik.data.kemdikbud.go.id> Pada 1 Maret 2023.

Latifah, Luluk. (2020). Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di SMP Negeri 10 Yogyakarta. *Analisis Spektrum Kebijakan Pendidikan*, 9 (1), 52-53.

Sabarudin, Iru, La., & Syahrir, A. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah (Studi Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat). *Selami IPS*, 3 (47), 246.

Walikota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah.*